

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARYA KAMUNING DI DESA WISATA KADUELA KABUPATEN KUNINGAN

Andien Novicka Zaelani Putri¹, Sutarjo², Ratna Sari Dewi³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

¹ 2210631040032@student.unsika.ac.id

Received: April, 2025; Accepted: Mei, 2026

Abstract

Community economic empowerment is a strategic approach to improving community welfare and independence by utilizing local potential. Village-Owned Enterprises (BUMDes) serve as village economic institutions that manage local resources and develop productive community businesses, particularly in tourism villages. However, challenges remain in community participation, equitable benefit distribution, and institutional management, while studies on empowerment through BUMDes in tourism villages are still limited. This study aims to analyze the community economic empowerment process implemented by BUMDes Arya Kamuning in Kaduela Tourism Village, Kuningan Regency, including its supporting and inhibiting factors and the outcomes achieved. A qualitative case study approach was employed using interviews, observations, and documentation involving seven informants. The findings indicate that empowerment is implemented through awareness, capacity building, empowerment, and independence stages, resulting in increased business opportunities, community income, and skills. Tourism potential and village government support facilitate empowerment, whereas limited human resources and fluctuating tourist visits remain major challenges, highlighting the need for stronger institutional capacity and broader community participation.

Keywords: Community participation, village institutions, local potential, economic independence, business development

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola sumber daya lokal dan mengembangkan usaha produktif masyarakat, khususnya di desa wisata. Namun, masih terdapat tantangan terkait partisipasi masyarakat, pemerataan distribusi manfaat, dan pengelolaan kelembagaan, sementara studi mengenai pemberdayaan melalui BUMDes di desa wisata masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduela, Kabupaten Kuningan, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta hasil yang dicapai. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan kemandirian, yang berdampak pada peningkatan peluang usaha, pendapatan masyarakat, serta keterampilan. Potensi pariwisata dan dukungan pemerintah desa memfasilitasi proses pemberdayaan, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia dan fluktuasi kunjungan wisatawan menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, kelembagaan desa, potensi lokal, kemandirian ekonomi, pengembangan usaha

How to Cite: Putri, A.N.Z., Sutarjo & Dewi, R.S. (2026). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arya Kamuning Di Desa Wisata Kaduella Kabupaten Kuningan. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 9 (2), 497-504.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Mulyono, 2012). Paradigma pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki hak untuk mengakses, mengelola, dan memperoleh manfaat dari potensi ekonomi lokal (Tosun, 2020). Dalam perspektif tersebut, pemberdayaan dipahami sebagai proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kemampuan, memperkuat posisi tawar, serta mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan (Saepudin & Mulyono, 2019). Menurut Suharto (2017), pemberdayaan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada terciptanya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupannya. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak semata-mata diukur melalui capaian ekonomi, melainkan juga melalui perubahan kapasitas individu, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penguatan ekonomi masyarakat desa memperoleh landasan yang semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri. Salah satu instrumen yang dibentuk untuk mendukung tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola aset, mengembangkan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam perkembangannya, BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Seiring berkembangnya konsep desa wisata sebagai model pembangunan berbasis potensi lokal, peran BUMDes menjadi semakin strategis dalam mengintegrasikan sektor pariwisata dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendekatan *community-based tourism* menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata (Zapata, et.al., 2011). Melalui pengelolaan yang partisipatif, BUMDes diharapkan mampu menghubungkan potensi wisata dengan berbagai kegiatan ekonomi produktif, seperti pengembangan usaha mikro, penyediaan jasa, pemberdayaan kelompok perempuan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat ekonomi serta memiliki kapasitas untuk mengelola potensi tersebut secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi desa, sementara kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, akses permodalan, serta keberlanjutan usaha masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Selain itu, pada desa wisata, dinamika jumlah kunjungan wisatawan

menyebabkan pendapatan masyarakat sering kali bersifat fluktuatif sehingga memerlukan strategi kelembagaan yang adaptif agar manfaat ekonomi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Penelitian mengenai BUMDes telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian memfokuskan pembahasan pada kinerja kelembagaan BUMDes, kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, pengembangan usaha ekonomi desa, maupun dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian lain juga menyoroti aspek tata kelola organisasi, pengembangan unit usaha, serta strategi pengelolaan desa wisata. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan pemberdayaan sebagai hasil akhir (*outcome*) sehingga lebih banyak mengukur keberhasilan melalui indikator ekonomi. Analisis mengenai bagaimana proses pemberdayaan berlangsung secara bertahap, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masih relatif terbatas, khususnya pada BUMDes yang mengelola desa wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes masih didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada hasil, sementara aspek proses pemberdayaan belum memperoleh perhatian yang memadai (Aref & Aref, 2010). Padahal, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh keberhasilan membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, memperluas partisipasi, dan mendorong terciptanya kemandirian masyarakat (Asker, et.al., 2010). Dengan demikian, pemahaman terhadap proses pemberdayaan menjadi penting untuk menjelaskan mengapa suatu program berhasil atau belum mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dalam perspektif proses (*process-oriented empowerment*), bukan semata-mata berdasarkan capaian ekonomi (United Nations World Tourism Organization, 2020). Penelitian ini mengkaji implementasi pemberdayaan menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), yaitu penyadaran (*awareness*), penguatan kapasitas (*capacity building*), pendayaan (*empowerment*), dan kemandirian (*independence*), kemudian menghubungkannya dengan pengelolaan berbagai unit usaha BUMDes pada konteks desa wisata. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis mengenai faktor pendukung, faktor penghambat, serta hasil pemberdayaan dalam satu kerangka yang komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis kelembagaan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduella, Kabupaten Kuningan, dengan mengacu pada tahapan pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta menjelaskan hasil pemberdayaan yang dicapai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat berbasis BUMDes, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduella, Kabupaten Kuningan. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki potensi wisata yang dikelola oleh BUMDes serta melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* sebanyak tujuh informan yang terdiri dari dua pengelola inti BUMDes, dua pelaku atau pengelola wisata, dua pelaku usaha mikro, dan satu perangkat desa. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait proses pemberdayaan, peran BUMDes, serta faktor pendukung dan penghambat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta data pendukung lainnya.

Tahapan penelitian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan instrumen penelitian dan penentuan informan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduella dilaksanakan secara terstruktur melalui berbagai unit usaha dan program yang saling terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, proses pemberdayaan tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mencakup layanan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Proses pemberdayaan diawali dari kegiatan penyadaran yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi desa, khususnya sektor wisata dan peluang usaha yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui pertemuan warga dan komunikasi langsung oleh pengelola BUMDes serta pemerintah desa. Pada tahap awal, tidak seluruh masyarakat langsung terlibat aktif, namun seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha lokal.

Selanjutnya, pada tahap penguatan kapasitas, BUMDes melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi secara langsung. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut terlibat dalam pengelolaan unit usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan ini mencakup pengelolaan layanan PPOB, partisipasi dalam unit simpan pinjam, kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta aktivitas dalam pengelolaan unit wisata. Selain

itu, terdapat kegiatan literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola pendapatan dan usaha secara lebih efektif. Proses ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui praktik langsung dan pendampingan.

Pada tahap pendayaan, masyarakat mulai mengembangkan usaha secara mandiri maupun berkelompok. Berdasarkan data lapangan, masyarakat memanfaatkan peluang dari berbagai unit usaha yang ada, seperti membuka usaha kuliner di area wisata, menyediakan jasa parkir, serta menjual produk lokal. Unit simpan pinjam juga dimanfaatkan sebagai akses permodalan untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu, keberadaan PPOB memberikan peluang tambahan bagi masyarakat dalam menyediakan layanan pembayaran kepada lingkungan sekitar.

Pada tahap kemandirian, sebagian masyarakat telah mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan tambahan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mulai menunjukkan inisiatif dalam mengembangkan usaha, seperti menambah variasi produk dan meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, tingkat kemandirian masih bervariasi, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukung utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning meliputi keberagaman unit usaha yang dikelola, potensi wisata desa yang cukup berkembang, serta dukungan dari pemerintah desa. Berdasarkan dokumen kegiatan, BUMDes juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam bentuk program pendukung yang berkontribusi terhadap pengembangan usaha masyarakat. Keberadaan unit usaha seperti PPOB, simpan pinjam, Kelompok Wanita Tani, serta unit wisata memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas wisata mampu menciptakan peluang usaha yang cukup luas dan mendorong munculnya usaha-usaha baru di sekitar lokasi wisata. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta fluktuasi jumlah pengunjung wisata. Namun, berdasarkan temuan lapangan, hambatan tersebut tidak mengurangi keberlangsungan program secara keseluruhan, melainkan menjadi tantangan dalam pengembangan yang lebih lanjut.

Hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari berbagai unit usaha yang dijalankan, baik melalui usaha mandiri maupun keterlibatan dalam kegiatan wisata. Unit usaha PPOB memberikan kemudahan akses layanan keuangan sekaligus peluang usaha bagi masyarakat. Unit simpan pinjam membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha, sehingga mendorong berkembangnya usaha kecil. Kegiatan Kelompok Wanita Tani memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, program literasi keuangan membantu masyarakat dalam mengelola pendapatan dan usaha secara lebih terarah.

Pada sektor wisata, pengelolaan dua unit wisata yang dilakukan oleh BUMDes memberikan dampak yang cukup luas, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data dokumentasi, unit wisata tersebut juga telah memperoleh penghargaan dalam pengelolaan desa wisata, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap

keberhasilan pengelolaan yang dilakukan. Capaian ini turut meningkatkan daya tarik wisata dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, kemandirian, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan melalui berbagai unit usaha BUMDes mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduella telah berjalan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2017), yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, memperkuat posisi tawar, serta mengelola aktivitas ekonomi secara mandiri. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan masyarakat dalam unit usaha seperti PPOB, simpan pinjam, Kelompok Wanita Tani, serta pengelolaan wisata menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang usaha yang sebelumnya terbatas.

Lebih lanjut, proses pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2017), yaitu penyadaran, penguatan kapasitas, pendayaan, dan kemandirian. Tahap penyadaran terlihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait potensi desa dan peluang usaha. Tahap penguatan kapasitas tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai unit usaha yang dikelola BUMDes, yang secara tidak langsung meningkatkan keterampilan dan pengalaman masyarakat. Tahap pendayaan terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri, sementara tahap kemandirian mulai terlihat dari adanya masyarakat yang mampu mempertahankan usahanya secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, temuan penelitian ini juga relevan dengan pendekatan *Community-Based Tourism*, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit wisata, baik sebagai pelaku usaha, penyedia jasa, maupun pengelola fasilitas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sebagai subjek dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Hal ini berdampak pada terbukanya peluang usaha baru serta peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.

Selain itu, keberagaman unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Arya Kamuning menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Hal ini memperkuat konsep pemberdayaan sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Unit usaha seperti PPOB dan simpan pinjam memberikan akses layanan ekonomi, sementara Kelompok Wanita Tani dan literasi keuangan berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, khususnya dalam pengelolaan usaha dan keuangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian masyarakat masih bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya merata

di seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan perluasan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan keberhasilan pemberdayaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning telah berjalan sesuai dengan konsep dan tahapan pemberdayaan yang ada, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Integrasi antara pengelolaan unit usaha, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan pemberdayaan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Arya Kamuning di Desa Wisata Kaduella telah dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai unit usaha, yaitu layanan PPOB, unit simpan pinjam, Kelompok Wanita Tani (KWT), program literasi keuangan, dan pengelolaan unit wisata desa. Proses pemberdayaan berlangsung melalui tahapan penyadaran, penguatan kapasitas, pendayaan, hingga kemandirian. Setiap tahapan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi lokal, memperkuat keterampilan melalui keterlibatan dalam pengelolaan usaha, serta mendorong berkembangnya usaha produktif sebagai sumber pendapatan.

Keberadaan unit-unit usaha BUMDes memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Layanan PPOB memperluas akses pelayanan dan peluang usaha, unit simpan pinjam mendukung permodalan, KWT memperkuat peran perempuan dalam kegiatan produktif, sedangkan program literasi keuangan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. Pengelolaan unit wisata juga menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Keberhasilan pemberdayaan didukung oleh potensi wisata, dukungan pemerintah desa, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta fluktuasi kunjungan wisatawan masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, pemberdayaan melalui BUMDes Arya Kamuning telah meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat serta memperkuat upaya menuju kemandirian ekonomi desa secara bertahap dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aref, F., Gill, S. S., & Aref, F. (2010). Tourism development in local communities: As a community development approach. *Journal of American Science*, 6(2), 155–161.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). Community-based tourism: Critical success factors. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
- Edi Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2021. Pedoman Pengembangan Desa Wisata. Jakarta.
- Mulyono, D. (2012). Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal. *Empowerment* 1(1), 63-68.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik (Rev. ed.). Alfabeta.
- Saepudin, A. & Mulyono, D. (2019). Community education in community development. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah* 8(1), 65-73.
- Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial (Cet. 6). PT Refika Aditama.
- Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- United Nations World Tourism Organization. (2020). Recommendations on Tourism and Rural Development. Madrid: UNWTO
- Zapata, M. J., Hall, C. M., Lindo, P., & Vanderschaeghe, M. (2011). Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. *Current Issues in Tourism*, 14(8), 725–749. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.559200>.